

**Peran Sulawesi Selatan dalam Strategi Lumbung Pangan BIMP-EAGA
(BIMP-EAGA Food Basket Strategy)**

by

Zulhair Burhan¹

Abstract

As a province member in sub-regional BIMP-EAGA cooperation that also become as a centre of agriculture production in East Indonesia, South Sulawesi is trying to make serious efforts to contribute in ASEAN Food Basket Program. In this research explained that South Sulawesi government implementing a program called Program Lumbung Pangan Masyarakat (people food basket program) as response to Food Basket Strategy that agreed in frame of BIMP-EAGA cooperation. This also indicate that sub-national actor, in this case is province, has important contribution to build cooperation in regional scheme of cooperation.

Key words: BIMP-EAGA, ASEAN, Food Basket Strategy, South Sulawesi, Sub-national cooperation

Pendahuluan

Dalam satu dasawarsa terakhir, masyarakat dunia diperhadapkan pada sebuah masalah besar yakni Krisis Pangan. Masalah-masalah seperti kurangnya ketersediaan, perubahan iklim hingga harga komoditas pangan yang terus melonjak membuat akses masyarakat terhadap bahan pangan menjadi kian sulit. Krisis pangan paling mutakhir ditandai dengan meningkatnya harga berbagai komoditi di pasaran internasional. Menurut "*Rising Food Prices: Policy Options and World Bank Response*," harga terigu dunia telah meningkat sebesar 181 persen dalam 36 bulan hingga Februari 2008. Di samping itu, seluruh harga pangan dunia meningkat sebesar 83 persen. Sementara itu, harga pangan pertanian diperkirakan terus meningkat pada 2008 dan 2009, setelah itu

¹ Penulis adalah Dosen Tetap pada Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa 45 Makassar

kembali menurun tapi masih di atas level harga 2004 hingga tahun 2015.²

Laporan lain dari organisasi pangan PBB (*Food and Agriculture Organisation/FAO*), menyatakan, index harga pangan dunia meningkat 9 persen pada 2006 dan 23 persen pada 2007. Pada bulan Maret tahun ini, harga terigu dan jagung sebesar 130, meningkat 30 persen ketimbang awal tahun. Sementara harga beras meningkat dua kali lipat sejak akhir Januari. Fenomena ini menyebabkan enam juta penduduk yang menempati planet ini, setengahnya mengalami kekurangan nutrisi, 854 juta orang kini tidur dalam keadaan lapar setiap hari, dan setiap tahun enam juta anak-anak di bawah umur lima tahun meninggal karena kelaparan. Laporan PBB tahun lalu menyebutkan, sejumlah 18 ribu anak mati setiap harinya karena konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari kekurangan nutrisi.³

Dalam catatannya, Mara Baviera dan Walden Bello menyebutkan bahwa pada tahun 2007-2008 sekitar 30 negara menghadapi aksi kekerasan akibat melonjaknya harga bahan pokok. Diantara Negara-negara tersebut, antara lain: Banglades, Burkina Faso, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, Papua Nugini, India, Indonesia, Mauritania, Mexico, Maroko, Mozambik, Senegal, Somalia, Uzbekistan, and Yaman.⁴

Terkait krisis pangan global ini, mayoritas masyarakat dunia –khususnya negara maupun berbagai skema kerjasama bilateral, regional maupun multilateral- melihatnya pada aspek ketersediaan pangan (*food security*). Dengan demikian, pendekatan ekonomi politik yang diterapkan untuk mengatasi krisis pangan mayoritas berbasis pada upaya untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pangan secara maksimal. Hal ini misalnya dapat terlihat dari komitmen ASEAN yang menjadikan aspek *food security* sebagai salah satu prioritas yang harus dikembangkan disamping upaya kelompok kerjasama Negara-negara Asia Tenggara tersebut untuk mempercepat skema ekonomi terbuka di kawasan

² Nergui Manalsuren, "Food Crisis Rippling Out, Like A "Tsunami", 21 May, 2008, Inter Press Service, <http://countercurrents.org/manalsuren210508.htm>

³ Ibid.

⁴ Mara Baviera dan Walden Bello, Food Wars, <http://monthlyreview.org/2009/07/01/food-wars>.

tersebut.⁵

Ketahanan pangan (food security) sendiri merupakan sebuah situasi dimana setiap orang dapat mengakses atau memperoleh pangan secara leluasa. Terkait hal tersebut aspek-aspek yang dijadikan indikator ketahanan pangan suatu territorial tertentu meliputi sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan.⁶

Karena telah menjadi permasalahan global, berbagai organisasi internasional baik yang berbasis Negara maupun non-Negara berupaya mendefinisikan konsep Ketahanan Pangan. Berikut defenisi-defenisi yang dipaparkan oleh organisasi-organisasi internasional tersebut.⁷ *First World Food Conference 1974, United Nations, 1975* “Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu... untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan..., dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.”

Defenisi selanjutnya dikemukakan oleh FAO (*Food and Agricultural Organization*), 1992 “Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.” Sementara itu bagi Bank Dunia (*World Bank*, 1996) “Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.”

Lebih lanjut OXFAM (2001) menjelaskan “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Ada dua kandungan makna yang tercantum disini, yakni ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, dan akses dalam artian hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim.”

Dan yang terakhir adalah FIVIMS (*Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems 2005*) yang mendefenisikan “Ketahanan

⁵Alexander C. Chandra & Lucky A. Lontoh, *Regional Food Security and Trade Policy in Southeast Asia: The Role of ASEAN*, http://www.iisd.org/tkn/pdf/regional_food_trade_asean_brief.pdf

⁶ Zacky Nouval F., dkk. 2010. *Petaka Politik Pangan Indonesia: Konfigurasi kebijakan pangan yang tak memihak rakyat*. Intrans Publishing: Malang. Hal. 105

⁷ Budi Winarno. 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Erlangga: Indonesia, hlm. 120-121.

pangan sebagai kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi, memiliki akses atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi, untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (*dietary needs*) dan pilihan pangan (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.”

Apabila kita telusuri lebih jauh, Ketahanan Pangan (Food Security) sebagai sebuah konsep sekaligus kebijakan pertama kali kita temui pada penyelenggaraan *World Food Summit* tahun 1974.⁸ Pembahasan Ketahanan Pangan pada forum tersebut memicu banyak pihak untuk menganalisis lebih jauh tentang konsep ini hingga terus mengalami polemik sekaligus perkembangan dari waktu ke waktu.

Salah satu teoretisi yang mencoba mendefinisikan Ketahanan Pangan adalah Maxwell. Penelusurannya seputar konsep Ketahanan Pangan dimulai sejak *World Food Summit* tahun 1974 hingga pertengahan dekade 1990-an. Maxwell memetakan tingkatan-tingkatan dalam membahas ketahanan pangan dari tingkat global, nasional, skala rumah tangga, dan bahkan individu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, pangan seharusnya dipandang dan dikelola sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) dan prasyarat keberlanjutan kehidupan (*livelihood perspective*).⁹

Dalam catatan Maxwell dan Slatter wacana Ketahanan Pangan ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mereka menemukan bahwa diskusi-diskusi seputar ketahanan pangan berubah cukup cepat dan signifikan dari pembahasan tentang ketersediaan-penyediaan (*supply and availability*) ke pembahasan seputar hak dan akses (*entitlements*). Bahkan sejak tahun 1980-an, wacana global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan (*food entitlements*) hingga resiko dan kerentanan (*vulnerability*).¹⁰

Akhirnya, dari beberapa rumusan mengenai definisi ketahanan pangan menurut berbagai lembaga pangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang menjamin ketersediaan produksi pangan,

⁸ Ibid.

⁹ Maxwell S. dan Frankenberger T. 1992. *Household Food Security Concepts, Indicators, and Measurements*. UNICEF and IFAD: New York, USA

¹⁰ Maxwell S. dan Slater R. 2003. *Food Policy Old and New. Development Policy Review*. Vol. 21(5-6), hlm. 531-553

lancarnya distribusi pangan, dan mampunya masyarakat memperoleh dan memilih pangan yang sehat untuk kehidupannya.

Secara historis konsep Ketahanan Pangan ini hadir sebagai sebuah respon terhadap krisis pangan global. Setelah pertama kali dikemukakan pada tahun 1974, Konsep ketahanan pangan menjadi semakin giat dibahas setelah berbagai Organisasi Internasional mengemukakan temuan-temuan mencengangkan tentang potensi kelaparan yang dialami 800 juta penduduk bumi. Fakta tersebut kemudian membuat Pemerintah dari berbagai Negara melalui *World Food Summit* pada November 1996 dengan slogan pangan bagi semua “*food for all*” menyepakati Deklarasi Roma. Disini Ketahanan Pangan dijelaskan sebagai pangan yang tersedia sepanjang waktu, setiap orang bisa mengaksesnya, yang dalam hal kuantitas, kualitas dan ragam nutrisi yang memadai, juga dapat diterima oleh budaya yang ada.¹¹

Deklarasi Roma ini merupakan respon sekaligus antisipasi terhadap krisis pangan. Hal itu tergambar melalui salah satu petikan Deklarasi Roma berikut;

“kami mengikrarkan tekad kami dan komitmen bersama dan komitmen nasional kami demi tercapainya ketahanan pangan bagi semua dan pada berlanjutnya upaya untuk menghapuskan kelaparan diseluruh Negara, dengan harapan segera mengurangi separuh angka orang yang kekurangan gizi tidak lebih dari tahun 2015. Kami menganggap kiranya tidak bisa ditolerir lagi bahwa lebih dari 800 juta orang kelaparan di seluruh dunia, khususnya di Negara-negara sedang berkembang, tidak memiliki cukup pangan demi memenuhi kebutuhan gizi dasar. Situasi semacam itu bagaimanapun juga tidak bisa dibiarkan...berbagai persoalan kerawanan pangan dan kelaparan itu mengandung dimensi global dan nampaknya akan terus berlanjut, dan bahkan dibeberapa wilayah akan semakin memburuk jika tidak ada tindakan segera, tegas dan bersama-sama, sebagai tindakan antisipasi atas peningkatan populasi dunia dan tekanan terhadap sumber daya alam”

¹¹ John Madeley. 2005. *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas* (terjemahan). Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang harus analisa dari berbagai bidang dan dielaborasi secara lebih komprehensif. Dari segi ekonomi, ketahanan pangan meliputi pasokan, distribusi, dan konsumsi. Sementara dari segi kelembagaan, ketahanan pangan harus dilihat dari beberapa tingkatan yakni individu atau keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kesemua hal tersebut akan terkoneksi dengan berbagai aspek pembangunan lainnya seperti pertanian, transportasi, teknologi, sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, ketahanan pangan bukan hanya sekedar pemenuhan produksi makanan, tetapi merupakan persoalan yang lebih kompleks, yang memiliki perspektif pembangunan dan ekonomi politik.¹²

Maxwel pun mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*) di level keluarga, yaitu:

Kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, Akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (*transfer*), Ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko, dan jaminan pengaman sosial, Fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis/kritis, transisi, dan/atau siklus.¹³

Tidak semua kelaparan bisa dikenali. Ada kelaparan yang tersembunyi (*hidden hunger*) yang dampaknya tidak langsung muncul seperti kelaparan yang kelihatan (*hunger*)¹⁴. Kelompok yang terakhir akan mudah dideteksi, misalnya pada saat musim kemarau, paceklik, bencana alam, atau perang. Namun, ternyata kelaparan kentara akibat hal tersebut jumlahnya kecil. Sedangkan kelaparan tersembunyi adalah kelompok jenis kelaparan yang susah dideteksi. Selain tidak mengenal waktu, jenis ini bisa muncul kapan dan dimana saja, tidak peduli kaya atau miskin. Untuk jenis kelaparan tidak terlihat, dibedakan lagi menjadi empat

¹² Khudori. 2005. *Lapar: Negeri Salah Urus!*. Resist Book: Yogyakarta, hlm. 74

¹³ Maxwell S., 1996, Op. Cit., hlm. 155

¹⁴ Khudori, Op. Cit., hlm. 11

macam, yaitu kurang energi dan protein (gizi buruk), kekurangan zat besi, kekurangan zat iodium, dan kekurangan vitamin A.

Pencapaian ketahanan pangan pun bisa diukur dengan menggunakan dua indikator yang dirumuskan oleh Maxwell dan Frankenberger¹⁵, yaitu: Indikator proses, terbagi:

Pertama, Indikator ketersediaan, yaitu indikator yang berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, praktik pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional, dan kerusuhan sosial. Sementara yang kedua adalah Indikator akses pangan, yaitu indikator yang meliputi sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal, dan strategi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Lebih lanjut dijelaskan Indikator dampak, terbagi: Indikator langsung, yaitu daya konsumsi dan kuantitas pangan. Sementara Indikator tidak langsung maksudnya adalah terkait dengan nutrisi dan gizi dari bahan pangan tersebut. Adalah benar bahwa kebijakan secara makro soal Ketahanan pangan ini diambil pada tingkatan global dan Negara akan tetapi yang berjuang untuk mewujudkannya ada pada tingkat lokal dan bahkan skala keluarga. Hal ini terutama terjadi di negara yang kaya akan sumberdaya hayati, bahan pangan, serta pengetahuan yang beragam dan sistem budaya. Dalam hal ini, ketahanan pangan tidak hanya segala hal yang berkaitan dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan air, iklim, dan segala hal yang sifatnya alami tetapi juga hal yang sifatnya dikonstruksi seperti ekonomi, politik dan budaya.¹⁶

Aspek lain yang juga mesti diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah kondisi perekonomian sebuah negara, yang kemudian berpengaruh pada devisa suatu negara, yang akan dimanfaatkan dalam sektor ekspornya, dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, ketahanan pangan pun sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik suatu negara, tentang persetujuan kerja sama antar aktor dalam sektor pangan, kebijakan-kebijakan pembangunan, dan pengelolaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Hira Jhamtani. 2008. *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*. INSISTpress: Yogyakarta, hlm. 115

sumberdaya alam berkelanjutan dalam suatu sistem. Maka wajarlah kiranya studi tentang ketahanan pangan ini erat kaitannya dengan studi ekonomi politik internasional.

Karenanya, dari pemaparan seputar aktor dan isu-isu utama di atas dapat kita titik beratkan pada empat pilar penopang yakni, pertama, aspek ketersediaan, stabilitas supply, keterjangkauan dan kebermanfaatannya. Dalam skema ketahanan pangan kesemuanya itu saling terkait satu sama lain. Yang juga perlu kita caca kondisi ketahanan pangan suatu Negara sangat bergantung pada komitmen pemerintah, baik itu komitmen sosial, budaya, politik maupun ekonomi nasionalnya. Artinya system sosial, politik, dan ekonomi suatu negaralah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya mewujudkan program ketahanan pangannya.

BIMP EAGA dan *Food Basket Strategy*

Untuk mendukung komitmen ASEAN terhadap ketahanan pangan, salah organisasi sub-regional dibawah ASEAN yakni BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*) yang melibatkan provinsi-provinsi/Negara Bagian di Negara-negara ASEAN bagian timur juga mengembangkan skema ketahanan pangan (*food security*) melalui skema yang disebut *Food Basket Strategy*.

BIMP EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) merupakan program kerjasama sub-regional yang pertama kali disepakati pada tahun 1994. Program kerjasama ini bertujuan untuk memberikan fokus perhatian terhadap pembangunan sosio-ekonomi wilayah yang masih terbelakang dan termajinalkan serta mempersempit kesenjangan pembangunan didalam wilayah sub-kawasan negara-negara BIMP EAGA. Secara geografis, sub-region ini meliputi seluruh wilayah kesultanan Brunei Darussalam; sembilan Provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, Maluku dan Papua (Indonesia); Negara Bagian Sabah dan Serawak dan Labuan (Malaysia); seluruh wilayah Pulau Mindanao yang terdiri dari 26 Provinsi dan Palawan (Filipina). Seluruh wilayah ini merupakan area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di

masing-masing Negara dan mereka dihubungkan oleh sejarah panjang hubungan perdagangan dan ekonomi yang sudah terjalin berabad-abad melalui sistem pertukaran komoditi (barter) hingga beberapa dekade yang lalu.

Tujuan jangka panjang kerjasama ini adalah untuk mengubah lanskap ekonomi wilayah BIMP-EAGA dari model ekonomi berbasis pada ekstraksi sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis *higher-order processing and nonresource-based activities*. Strategi ini diharapkan dapat memobilisasi sektor swasta untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan pemerintah diharapkan dapat menciptakan ruang bagi investasi yang lebih luas. Dan salah satu sektor yang mendapat perhatian dan fokus khusus adalah sektor pangan. Hal ini dapat terlihat dengan dimasukkannya sektor ini dalam salah satu pilar penting BIMP-EAGA yang kemudian diturunkan dalam strategi lumbung pangan (*Food Basket Strategy*).

A. Strategi Lumbung Pangan (*Food Basket Strategy*)

Strategi Lumbung Pangan (*Food Basket Strategy*) dicanangkan untuk mengoptimalisasi kekayaan dan keragaman sumber daya alam dibawah laut dan di daratan, Strategi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah BIMP-EAGA. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ke 5 yang diadakan pada Februari 2009 di Cha-am, Hua Hin Thailand, pemimpin-pemimpin Negara EAGA memutuskan untuk mengintensifkan kerjasama diantara Negara-negara EAGA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekayaan alam kawasan ini secara berkelanjutan menuju peningkatan potensi EAGA untuk menjadi kawasan lumbung pangan. Untuk menindaklanjuti komitmen ini, pada November 2010, melalui Pertemuan Menteri Pertanian dan Perikanan Negara-negara EAGA disepakati kerangka kerja strategis bagi Inisiatif Lumbung Pangan (*Food Basket Initiative*) yang diselaraskan dengan kerangka kerja ASEAN dalam hal komunitas ekonomi dan ketahanan pangan.¹⁷

¹⁷ BIMP-EAGA Implementation Blue Print 2012-2016, Diunduh dari <http://www.bimp-eaga.org/Pages/List.aspx?collid=14>

Kerangka kerja lumbung pangan diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi BIMP-EAGA untuk mempromosikan program ketahanan pangan jangka panjang dan dapat memposisikan Negara-negara EAGA menjadi lumbung pangan ASEAN dan Negara-negara Asia lainnya. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, integrasi ekonomi industri-industri pertanian dan sektor perikanan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan penghasilan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Negara-negara BIMP-EAGA.¹⁸

Strategi Lumbung Pangan (*Food Basket Strategy*) memiliki tiga tujuan yang berbeda namun saling menguatkan, yaitu : (1) memastikan tercapainya ketahanan pangan jangka panjang di sub-region BIMP-EAGA; (2) mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, dan produk perikanan berorientasi ekspor; dan (3) mempromosikan sumber pendapatan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi petani dan nelayan.¹⁹

Negara-negara EAGA sedang berupaya keras dan bersama-sama berupaya mewujudkan aspek-aspek penting terkait target mencapai ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kecukupan pangan, aksesibilitas, dan suplai bahan pangan secara berkelanjutan. Ketiga aspek terkait ketahanan pangan ini menjadi poin utama untuk menjamin tercapainya keamanan dan suplai bahan pangan mulai dari tingkat regional, nasional hingga rumah tangga.

A.1. Ketahanan Pangan

Diantara ketiga tujuan strategis strategi lumbung pangan BIMP-EAGA, maka ketahanan pangan jangka panjang disepakati menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan. Untuk mencapai target ketahanan pangan di tingkat subregion tentu membutuhkan kebijakan penguat yang mendukung pencapaian tersebut di tingkat nasional. Masing-masing Negara diharapkan dapat memastikan implementasi dan pengembangan beberapa hal, antara lain :

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

1. Memastikan produksi pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas serta tingkat keuntungan melalui proses yang berkualitas tinggi, dan pengembangan teknologi dan fasilitas pasca panen.
2. Meningkatkan akses bantuan keuangan (modal) bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air bagi produksi pangan.
5. Mengembangkan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Memperhatikan dampak perubahan iklim.
7. Memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
8. Menyediakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi pada suplai bahan pangan/rantai nilai.²⁰

Untuk mewujudkan pengembangan diatas, maka proposal terkait program ketahanan pangan BIMP-EAGA mesti disandarkan pada aktivitas berikut :

1. Melakukan review komprehensif dan penilaian terhadap sumber daya pertanian perikanan, kapasitas produksi, dan potensi bisnis di sub-region;
2. Merumuskan kerangka kebijakan ketahanan pangan BIMP-EAGA;
3. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan (R & D) serta pengembangan teknologi;
4. Membentuk sistem informasi ketahanan pangan di sub-regional;
5. Membentuk stok penyangga BIMP-EAGA yang dapat berperan sebagai mekanisme bantuan darurat pangan;
6. Memproduksi produk makanan yang disesuaikan dengan standar keamanan pangan internasional;
7. Menyediakan insentif untuk mendorong investasi sektor swasta dalam pasokan bahan pangan / rantai nilai;

²⁰ Ibid.

8. Memberikan layanan fasilitas untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah khususnya untuk produksi dan perdagangan; dan
9. Memberikan hak petani dan nelayan di BIMP-EAGA²¹

A.2. Pengembangan Ekspor

Untuk mendukung tujuan ketahanan pangan, BIMP-EAGA berkomitmen untuk memprioritaskan ekspor komoditi dan produk berbasis pertanian dan perikanan. Komitmen ini juga merupakan bagian dari agenda pembangunan ekonomi BIMP-EAGA dan sekaligus menjadi tujuan integrasi ekonomi ASEAN. Komitmen pengembangan aktivitas ekspor ini bertujuan untuk mengintegrasikan produk berbasis pertanian dan perikanan dalam keseluruhan inisiatif promosi dan perdagangan BIMP-EAGA; mempertimbangkan kebutuhan khusus aktivitas ekspor industri agro dan perikanan dalam pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur.²²

A.3. Penghidupan yang Berkelanjutan

Terkait tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta promosi ekspor produk berbasis pertanian dan perikanan, terdapat tujuan yang tak kalah pentingnya yaitu keberlanjutan penghidupan atau mata pencaharian dari petani dan nelayan. Beberapa hal yang mencakup keberlanjutan penghidupan petani dan nelayan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah nasional maupun dalam skema kerjasama regional antara lain :

1. Pengembangan produktivitas dan profitabilitas melalui pemberdayaan organisasi petani dan nelayan.
2. Berbagi pengalaman dan model bisnis yang tepat untuk mengakses fasilitas kredit,
3. Mempromosikan jasa dan fasilitas inkubasi bisnis.
4. Memastikan terjaganya keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Sebagai tambahan, kerjasama regional akan diarahkan pada :

1. Mengembangkan aturan praktis bersama dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan terkait sistem pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan model mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan pada komunitas masyarakat pesisir di Segitiga Karang (Coral Triangle, termasuk Indonesia dan Filipina) yang bertujuan untuk mempromosikan model mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan.

Kerjasama regional terkait manajemen pengetahuan, kebijakan, dan dukungan kelembagaan ke CTI, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas bagi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.²³

Sulawesi Selatan dan Program Nasional Lumbung Pangan Masyarakat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tercapainya strategi lumbung pangan yang dikembangkan melalui BIMP-EAGA membutuhkan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah masing-masing Negara terkhusus pemerintah Provinsi di area EAGA. Dan salah satu provinsi yang memiliki peran penting terkait dengan program lumbung pangan adalah Sulawesi Selatan.

Salah satu program terkait upaya untuk menciptakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Program Lumbung Pangan Masyarakat. Program ini merupakan bagian dari program nasional pemerintah terkait pengembangan cadangan pangan masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam tiga tahapan: tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian.

Pada tahap penumbuhan, kegiatan yang dilakukan meliputi melalui kelompok dan lokasi, penetapan kelompok sasaran dan pemanfaatan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Pembangunan fisik lumbung pangan ini dilakukan diatas lahan milik kelompok atau lahan yang sudah dihibahkan kepada kelompok. Tahap pengembangan, mencakup pengadaan bahan pangan untuk pengisian lumbung dan pengembangan

²³ Ibid.

kapasitas kelompok. Dan tahap kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan Cadangan Pangan²⁴ serta kelembagaan cadangan pangan²⁵.

Adapun langkah-langkah kegiatan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :²⁶

1. Tahap Penumbuhan

- a. identifikasi desa dan kelompok
- b. sosialisasi;
- c. seleksi;
- d. penetapan
- e. pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk pembangunan fisik lumbung ; dan
- f. inventarisasi

2. Tahap Pengembangan

- a. verifikasi;
- b. penetapan;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pelatihan;
- e. penyusunan RUK;
- f. penyaluran Dana Bantuan Sosial;
- g. pengisian Cadangan Pangan;
- h. penguatan kelembagaan;
- i. penguatan Cadangan Pangan;
- j. pembinaan

3. Tahap Kemandirian

- a. penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk penguatan modal;
- b. pemantapan kelembagaan lumbung pangan;
- c. pemantapan Cadangan Pangan;
- d. pelatihan dalam rangka menunjang keberlanjutan; dan

²⁴ Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.

²⁵ Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 2014, Hal. 5

²⁶ Ibid. Hal. 6

- e. pendampingan

Implementasi Program Lumbung Pangan Masyarakat di Sulawesi Selatan

Program Lumbung Pangan Masyarakat telah diimplementasikan di Sulawesi Selatan sejak pertama kali program ini dicanangkan secara nasional pada tahun 2009 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 520/124/SK/VII/2009 tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Lumbung Pangan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemberdayaan Lumbung Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009.

Pada ketetapan ini ditetapkan Kelompok Lumbung Pangan yang berada di Lokasi Desa Mandiri Pangan pada sepuluh kabupaten yakni: Maros, Barru, Pinrang, Soppeng, Wajo, Sidrap, Enrekang, Luwu Timur, Takalar, Sinjai dan satu kota yakni Palopo sebagai Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Lumbung Pangan. Hingga tahun 2011, alokasi bantuan sosial pembangunan dan pengembangan lumbung pangan ini masih dialokasikan untuk kesepuluh kabupaten dan satu kota ini.

Untuk tahun 2012, skema bantuan yang diberikan pemerintah telah diarahkan pada pengembangan program lumbung pangan. Hal ini terlihat melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 450/109/A2/SK/IV/BKPD tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan DAK 2010 dan DAK Tahun 2010 Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Lumbung Pangan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengembangan Lumbung Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 yang menetapkan 15 Kab/Kota yaitu: Pangkep, Sidrap, Toraja Utara, Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Soppeng dan Bone sebagai bagian dari program tersebut.

Pada tahun anggaran 2013, kelimabelas Kabupaten/Kota yang sebelumnya mendapatkan bantuan kembali menerima bantuan sosial pembangunan lumbung pangan, namun kali ini diarahkan pada tahap pengembangan dan kemandirian. Untuk tahun anggaran 2014, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalokasikan bantuan yang diarahkan pada

tahap pengembangan dan kemandirian, namun hanya terdapat 4 (empat) kabupaten yang berhak menerima bantuan yaitu: Tana Toraja, Takalar, Bulukumba dan Luwu Utara.

Salah satu program yang hingga kini terus dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait komitmen Negara untuk memastikan ketersediaan pangan baik pada tingkat lokal maupun nasional adalah Program Lumbung Pangan Nasional. Program ini secara lebih khusus memberikan porsi besar bagi keterlibatan masyarakat dalam hal ini kelompok tani di berbagai wilayah untuk berpartisipasi secara aktif untuk membangun dan mengembangkan lumbung pangan.

Pengembangan program ini bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bimbingan dan dukungan pengembangan dilakukan terhadap kelompok secara partisipatif, agar kelompok memiliki kemampuan dalam :²⁷

1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan kelompok dalam upaya pengembangan Cadangan Pangan;
2. Menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan dan keberlanjutan Cadangan Pangan, kebutuhan penyediaan Cadangan Pangan bagi kelompok, dan upaya lain untuk mengatasi kekurangan pangan; dan
3. Menetapkan rencana kegiatan yang telah disusun bersama dan difasilitasi oleh aparat provinsi dan kabupaten

Untuk mewujudkan program ini, pemerintah telah merancang berbagai strategi, yakni strategi dasar dan strategi keberlanjutan program. Pada strategi dasar, pemerintah merancang beberapa hal terkait pengembangan lumbung pangan masyarakat, antara lain:²⁸

1. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan

²⁷ Ibid. Hal. 7

²⁸ Ibid

2. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk penguatan kelembagaan agar mampu mengembangkan usaha kelompok untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan.

Sedangkan dalam strategi keberlanjutan program, pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap Kelompok Lumbung Pangan masyarakat yang telah melalui tahap pasca mandiri melalui:²⁹

1. Memelihara keberlanjutan Cadangan Pangan yang ada di kelompok Lumbung Pangan masyarakat.
2. Menerbitkan regulasi melalui peraturan gubernur/bupati/walikota agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan keberlanjutan.
3. Menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok.
4. Meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan Cadangan Pangan dan kemitraan secara berkelanjutan.
5. Melakukan advokasi dalam rangka penyerahan aset Dana Alokasi Khusus bidang pertanian kepada kelompok.

Kesimpulan

1. Food Basket Strategy merupakan program yang dicanangkan oleh BIMP-EAGA untuk memastikan terciptanya kondisi ketahanan pangan di area BIMP pada khususnya dan ASEAN pada umumnya.
2. Sejauh ini program Food Basket Strategy masih pada tataran konseptual yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional masing-masing Negara terkait upaya untuk memastikan terciptanya ketahanan pangan di Negara tersebut. Di Indonesia misalnya, kebijakan yang memiliki substansi sama seperti program Food Basket Strategy bisa terlihat pada kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah diimplementasikan sejak tahun 2009.

²⁹ Ibid

3. Kebijakan Lumbung Pangan masyarakat ini lah yang dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia tidak terkecuali Sulawesi Selatan yang memang merupakan salah satu wilayah penyedia cadangan pangan Indonesia. Terkait keikutsertaan Sulawesi Selatan di BIMP-EAGA, maka implementasi kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dilihat sebagai upaya tak terpisahkan dengan Program Food Basket Strategy dalam konteks sub-regional.
4. Implementasi kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat di Sulawesi Selatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Food Basket Strategy BIMP-EAGA juga menunjukkan bahwa aktor sub-nasional, dalam hal ini Provinsi, memiliki peran penting dalam membangun konektivitas dan kohesivitas sub-regional hingga regional.

Daftar Pustaka

- Asia: The Role of ASEAN,
http://www.iisd.org/tnk/pdf/regional_food_trade_asean_brief.pdf
- Baviera, Mara dan Walden Bello, Food Wars,
<http://monthlyreview.org/2009/07/01/food-wars>.
- BIMP-EAGA Implementation Blue Print 2012-2016, Diunduh dari
<http://www.bimp-eaga.org/Pages/List.aspx?collid=14>
- Chandra, Alexander C. & Lucky A. Lontoh, Regional Food Security and Trade Policy in Southeast
- Hira Jhamtani. 2008. *Lambung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*. INSISTpress: Yogyakarta
- John Madeley. 2005. *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas* (terjemahan). Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.
- Khudori. 2005. *Lapar: Negeri Salah Urus!*. Resist Book: Yogyakarta
- Manalsuren, Nergui, 2008. "Food Crisis Rippling Out, Like A "Tsunami", Inter Press Service, <http://countercurrents.org/manalsuren210508.htm>
- Maxwell S. dan Frankenberger T. 1992. *Household Food Security Concepts, Indicators, and Measurements*. UNICEF and IFAD: New York, USA
- Maxwell S. dan Slater R. 2003. *Food Policy Old and New. Development Policy Review*. Vol. 21(5-6), hlm. 531-553
- Nouval F, Zacky., dkk. 2010. *Petaka Politik Pangan Indonesia: Konfigurasi Kebijakan Pangan yang Tak Memihak Rakyat*. Intrans Publishing: Malang
- Pedoman Pengembangan Lambung Pangan Masyarakat 2014
- Winarno, Budi. 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Penerbit Erlangga: Indonesia